



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu dalam menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mudah sebagai satu keutuhan informasi dalam mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip, perlu diatur pedoman mengenai jadwal retensi dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
2. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif yang selanjutnya disebut JRA Fasilitatif adalah daftar yang berisi jenis arsip fasilitatif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip fasilitatif.
3. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disebut JRA Substantif adalah daftar yang berisi jenis Arsip Substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip substantif.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.
6. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada Unit Pengolah.

7. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada unit kearsipan/pusat arsip.
8. Keterangan Musnah yang selanjutnya disebut Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis Arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi
9. Keterangan Permanen yang selanjutnya disebut Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis Arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen serta nilai guna kesejarahan wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
10. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
11. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
12. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
13. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
14. Unit Kerja adalah satuan organisasi di Kementerian Dalam Negeri.
15. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pencipta Arsip di lingkungannya.
16. Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 2

- (1) JRA Kementerian digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan dan penyelamatan Arsip di lingkungan Kementerian.
- (2) JRA Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. JRA Fasilitatif; dan
 - b. JRA Substantif.
- (3) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. jenis Arsip;
 - b. Retensi Arsip; dan
 - c. keterangan.

Pasal 3

- (1) Jenis Arsip pada JRA Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - b. perlengkapan;
 - c. pengadaan;
 - d. perpustakaan;
 - e. kearsipan;
 - f. teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. perencanaan;
 - h. organisasi dan tatalaksana;
 - i. hukum;
 - j. hubungan masyarakat;
 - k. pengawasan;
 - l. kepegawaian; dan
 - m. keuangan.
- (2) Jenis Arsip pada JRA Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. politik dan pemerintahan umum;
 - b. administrasi kewilayahan;
 - c. otonomi daerah;
 - d. pembangunan daerah;
 - e. pemerintahan desa;
 - f. keuangan daerah;
 - g. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. pengawasan internal Kementerian dan pengawasan pemerintah daerah;
 - i. pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri;
 - j. kajian strategis kebijakan dalam negeri; dan
 - k. pendidikan dan kepamongprajaan;

Pasal 4

- (1) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditentukan untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif.
- (2) Retensi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kepentingan pertanggungjawaban di Unit Pengolah.
- (3) Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja terkait dan kepentingan lembaga.
- (4) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung sejak Arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.

Pasal 5

JRA yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berisi rekomendasi penetapan Arsip Musnah, atau Permanen.

BAB III
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 6

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian mencakup:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip;
- b. Pengamanan Arsip; dan
- c. Akses Arsip.

Pasal 7

- (1) Klasifikasi Keamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. biasa/terbuka;
 - b. terbatas; dan
 - c. rahasia.
- (2) Klasifikasi Keamanan Arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
- (3) Klasifikasi Keamanan Arsip terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
- (4) Klasifikasi Keamanan Arsip rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum.

Pasal 8

- (1) Pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan terhadap fisik Arsip di dalam ruang simpan.
- (2) Ruang simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. pemasangan kamera pengawas;
 - b. kunci pengamanan ruangan; dan
 - c. media simpan.

Pasal 9

- (1) Pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa rak Arsip untuk menyimpan Arsip biasa/terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk Arsip rahasia; dan
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip bebas magnet sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.

- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar Arsip;
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip; dan
 - c. penggunaan kata sandi.

Pasal 10

- (1) Akses Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Menteri, pejabat struktural, arsiparis, dan pengelola Arsip sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Akses Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pegawai pada Unit Kerja setelah mendapatkan izin dari Menteri, pejabat struktural pada Unit Kerjanya, arsiparis, dan/atau pengelola Arsip.

Pasal 11

Ketentuan mengenai JRA dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan Pasal 9 dan Lampiran huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282); dan
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1086),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2024

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2024

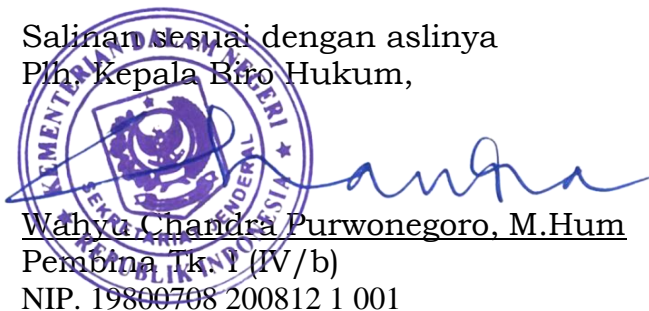
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 920

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2024
 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI
 KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DILINGKUNGAN
 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

JADWAL RETENSI ARSIP, SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DILINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	JENIS ARSIP		JADWAL RETENSI ARSIP		KETERANGAN	SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP				
			AKTIF	INAKTIF		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
I	FUNGSI FASILITATIF									
	A	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN								
		1 Telekomunikasi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a Perjalanan Dinas Pejabat Eselon I								
		b Perjalanan Dinas Pegawai								
		c Perjalanan Tamu Asing ke Daerah								
		3 Perjalanan Dinas Luar Negeri	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a Perjalanan Dinas Pejabat Eselon 1								
		b Perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah								
		c Perjalanan Dinas Anggota DPRD								
		d Perjalanan Dinas Pegawai								

		4	Penggunaan Fasilitas Kantor antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor lainnya	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		5	Rapat Pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat	1 Tahun	2 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		6	Penyediaan Konsumsi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		7	Pengurusan Kendaraan Dinas	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a	Pengurusan Surat-surat Kendaraan Dinas								
		b	Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas								
		c	Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan								
		8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a	Pertamanan/ <i>Landscape</i>								
		b	Penghijauan								
		c	Perbaikan Gedung								
		d	Perbaikan Peralatan Kantor								
		e	Perbaikan Rumah Dinas/Wisma								
		f	Kebersihan Gedung dan Taman								
		9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon, dan Komputer:	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a	Perbaikan/Pemeliharaan								
		b	Pemasangan								

		10	Ketertiban dan Keamanan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			a	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan Terhadap Pejabat, Kantor, dan Rumah Dinas								
			b	Laporan Ketertiban dan Keamanan								
		11	Administrasi Pengelolaan Parkir		1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan, dan Pegawai Lainnya		1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
	B	PERLENGKAPAN										
		1	Inventarisasi dan Penyimpanan		1 Tahun Setelah BMN Dihapuskan/ Alih Kepemilikan	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			a	Data Hasil Inventarisasi dan Penyimpanan								
			b	Laporan Evaluasi Inventarisasi dan Penyimpanan								
		2	Pemeliharaan Peralatan Kantor		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			a	Data Hasil Pemeliharaan Kantor								
			b	Laporan dan Evaluasi Pemeliharaan Kantor								
		3	Distribusi		1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			a	Barang Habis Pakai								
			b	Barang Milik Negara								
		4	Penghapusan Barang Milik Negara antara lain: Keputusan Pembentukan		2 Tahun Setelah BMN Dihapuskan/	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak	Unit Pengolah Terkait

			Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Kementerian Dalam Negeri, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMN termasuk Didalamnya Proses Lelang Penghapusan	Alih Kepemilikan						Merugikan Siapapun		
		5	Pengelolaan <i>Database</i> Barang Milik Daerah	2 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait	
	C	PENGADAAN										
		1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa antara lain: Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa, Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan, Penetapan Kebijakan Umum, Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait	
		2	Pengadaan Langsung antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak	2 Tahun Setelah Barang Dihilangkan/ Alih Kepemilikan	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait	
		3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang antara lain:	2 Tahun Setelah Barang Dihilangkan/ Alih Kepemilikan	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait	
	a		Persiapan Pemilihan Penyedia,									
	b		Pelaksanaan Pemilihan Penyedia									
		c	Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak									

		4	Swakelola antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi	2 Tahun Setelah Barang Dihapuskan/ Alih Kepemilikan	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain: Database Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, Data Base Kontrak, Data Base Pengadaan Barang/Jasa	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		6	Monitoring dan Evaluasi antara lain:	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
	a		Laporan Hasil Monitoring								
	b		Laporan Hasil Evaluasi								
	D	PERPUSTAKAAN									
		1	Deposit Bahan Pustaka	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
	a		Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman								
	b		Bibliografi dan Katalog								
		2	Koleksi Pustaka	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
	a		Pembelian								
	b		Hibah								
	c		Hadiah								
	d		Tukar Menukar								
	e		Terbitan Internal								
	f		Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus								
	g	Inventarisasi Koleksi (Buku Induk)									
		3	Pengolahan Bahan Pustaka	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait

		4	Pangkalan Data Katalog Koleksi	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait	
		5	Layanan Perpustakaan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait	
		a	Keanggotaan									
		b	Peminjaman									
		6	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait	
	5	KEARSIPAN										
		1	Pembinaan Kearsipan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait	
		a	Pengembangan Profesi Arsiparis antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis									
		b	Bimbingan Konsultasi Arsiparis									
		c	Pemilihan Arsiparis Teladan antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan									
			d	<i>Database</i> Arsiparis	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			e	Bimbingan Konsultasi Kearsipan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak	Unit Pengolah Terkait

										Merugikan Siapapun		
			f	Supervisi dan Evaluasi antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			g	Database Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			h	Fasilitasi Kearsipan antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			i	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			j	Jadwal Retensi Arsip antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI	1 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2	Pengelolaan Arsip Dinamis									
			a	Penciptaan antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait

			b	Pemberkasan Arsip Aktif antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			c	Penataan Arsip Inaktif antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			d	Penggunaan antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			e	Autentikasi Arsip Dinamis antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3		Program Arsip Vital antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		4		Pengelolaan Arsip Terjaga antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga.	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		5		Penyusutan Arsip								

			a	Pemindahan Arsip antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip Yang Dipindahkan	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			b	Pemusnahan Arsip antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI Untuk Pemusnahan Arsip Dengan Retensi Sekurang-Kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah Selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk Pemusanahan Arsip Dengan Retensi Di Bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.	1 Tahun Setelah Kementerian Dibubarkan	0 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			c	Penyerahan Arsip Statis antara lain: Pembentukan Panitia Penilai, Notulen Rapat Panitia, Surat Pertimbangan Panitia Penilai, Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat Pernyataan Autentik, Terpercaya, Utuh, dan Digunakan dari Pencipta Arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara	1 Tahun Setelah Kementerian Dibubarkan	0 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait

			Penyerahan Arsip, Daftar Arsip Yang Diserahkan								
		6	Database Pengelolaan Arsip Dinamis	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a	Database Pengelolaan Arsip Aktif								
		b	Database Pengelolaan Arsip Inaktif								
		7	Pengelolaan SIKN dan JIKN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		8	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		9	Pengawasan Kearsipan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a	Pengawasan Kearsipan Internal								
		b	Pengawasan Kearsipan Eksternal								
		a	Sumber Daya Manusia (SDM)								
		b	Jaringan Komunikasi								
	F	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)									
		1	Organisasi TIK								
		a	Rencana Strategis TIK	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		b	Enterprise Architecture	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait

			c	Tata Kelola Teknologi Informasi	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			d	Perencanaan TIK	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2	Sistem Informasi (<i>Website, e-mail</i>)									
			a	Perencanaan dan Analisis Sistem	1 Tahun Setelah Sistem Informasi Tidak Digunakan	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			b	Perancangan Sistem	1 Tahun Setelah Sistem Informasi Tidak Digunakan	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			c	Pembangunan dan Implementasi Sistem	1 Tahun Setelah Sistem Informasi Tidak Digunakan	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			d	Pemeliharaan Sistem Informasi	1 Tahun Setelah Sistem	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak	Unit Pengolah Terkait

					Informasi Tidak Digunakan					Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			e	Dokumentasi Sistem Informasi	1 Tahun Setelah Sistem Informasi Tidak Digunakan	4 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3	Manajemen Layanan Teknologi Informasi (<i>Hotspot</i> , Lisensi)									
			a	Desain Strategi Layanan	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			b	Rancangan Layanan	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			c	Transisi Layanan	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			d	Layanan Operasional	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		4	Pengelolaan Data									
			a	Tata Kelola Data	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait

											Merugikan Siapapun	
			b	Pengelolaan Arsitektur Data	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			c	Pengembangan Data	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			d	Pengelolaan Pengoperasian Data	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			e	Pengelolaan Keamanan Data	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			f	Pengelolaan Kualitas Data	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		5	Pengelolaan Data									
			a	Perencanaan Pengolahan Data	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			b	Persiapan Pengolahan Data	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak	Unit Pengolah Terkait

										Merugikan Siapapun		
			c	Pelaksanaan Pengolahan Data	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			d	Monitoring dan Evaluasi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		6	Jaringan dan Komunikasi (Teleconference, Video Conference, Domain/Subdomain)									
			a	Analisis Jaringan Komputer	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			b	Perancangan Jaringan Komputer	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			c	Implementasi Jaringan Komputer	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			d	Pemeliharaan Jaringan	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait

		7	Manajemen Fasilitas TIK									
			a	Perencanaan Fasilitas TIK	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			b	Pengoperasian dan Evaluasi Fasilitas TIK	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			c	Pemeliharaan Fasilitas TIK	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		8	Audit TIK									
			a	Perencanaan Audit TIK	1 Tahun Setelah Audit	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			b	Tinjauan Awal Audit TIK	1 Tahun Setelah Audit	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			c	Analisis Data Audit TIK	1 Tahun Setelah Audit	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			d	Evaluasi Temuan	1 Tahun Setelah Audit	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak	Unit Pengolah Terkait

									Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan		
		9	Manajemen Risiko TIK									
			a	Identitas Risiko TIK	1 Tahun Setelah Audit	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Penilaian Risiko TIK	1 Tahun Setelah Audit	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			c	Pengendalian Risiko TIK	1 Tahun Setelah Audit	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			d	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Risiko TIK	1 Tahun Setelah Audit	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		10	Pemetaan TIK		1 Tahun	4 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak	Unit Pengolah Terkait

									Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan		
	G	PERENCANAAN										
		1	Strategi pembangunan									
			a	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/ <i>Master Plan</i>	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			b	Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM)	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			c	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2	Program Kerja Tahunan									
			a	Usulan Program Satuan Organisasi/Kerja beserta data pendukung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Program Kerja Tahunan Satuan Organisasi/Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait

			c	Program Kerja Tahunan Kementerian Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3	Penetapan/Kontrak Kinerja									
			a	Menteri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			b	Pimpinan Satuan Organisasi/Kerja Eselon I	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		4	Laporan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		a	Laporan Berkala									
		b	Laporan Harian									
		c	Laporan Mingguan									
		d	Laporan Bulanan									
		e	Laporan Triwulan									
		f	Laporan Semesteran									
			g	Laporan Tahunan Satuan Organisasi/Kerja								
			h	Laporan Tahunan Kementerian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			i	Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kementerian Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			j	Laporan insidental	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat	Unit Pengolah Terkait

									Eksternal Serta Penegak Hukum	Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
		5	Evaluasi Program	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			a Evaluasi Program Satuan Organisasi/Kerja								
			b Evaluasi Program Kementerian								
	H	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA									
		1	Struktur Organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			a Pembentukan								
			b Pengubahan								
			c Pembubaran								
		2	Uraian Jabatan	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			a Analisa Jabatan								
			b Analisa Beban Kerja								
		3	Ketatalaksanaan	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			a Standar Pelayanan								
			b Standar Operasional Prosedur								
			c Pelayanan Publik								
			d Proses Bisnis								
		4	Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional	3 Tahun	2 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait

		5	Evaluasi Kelembagaan	3 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi	3 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a	Budaya Kerja								
		b	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi								
		c	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah								
	I	HUKUM									
		1	Program Legislasi	1 Tahun	4 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a	Bahan/Materi Program Legislasi Nasional dari Instansi								
		b	Program Legislasi Kementerian Dalam Negeri								
		2	Rancangan Peraturan Perundang-undangan	2 Tahun Setelah Diundangkan	3 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a	Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal Sampai Dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum Sampai Diundangkan								
			b								
			Rancangan Peraturan Pemerintah, Termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum sampai dengan Rancangan Akhir dan								

				Telaah Hukum sampai Diundangkan								
			c	Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri, termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum.								
			d	Rancangan Peraturan Daerah, termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum sampai Diundangkan.								
		3	Peraturan/Keputusan Menteri		2 Tahun Setelah Diundangkan	3 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		4	Instruksi/Surat Edaran		2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a	Intruksi/Surat Edaran Menteri									
		b	Instruksi/ Surat Edaran Setingkat Eselon I Dan II, Termasuk Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum									
		5	Surat Perintah Antara Lain:		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan	Unit Pengolah Terkait
		a	Surat Perintah Menteri									
		b	Surat Perintah Eselon I dan II									

									Penegak Hukum	Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
		6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat Nasional/Regional/Instansional Termasuk Rancangan Awal Sampai Dengan Rancangan Akhir.	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		7	Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Berskala Nasional dan Internasional	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			a Dalam Negeri								
			b Luar Negeri								
		8	Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Tidak Berskala Nasional dan Internasional	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			a Dalam Negeri								
			b Luar Negeri								
		9	Dokumen Hukum Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		10	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka		Apabila Diketahui Oleh	

			a	Berkas yang Berhubungan dengan Kegiatan Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum						Pengguna Internal dan Eksternal	Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			b	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penyuluhan Hukum								
		11		Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Berkas tentang Pemberian Bantuan/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		12		Kasus/Sengketa Hukum								
			a	Berkas tentang Kasus/Sengketa Pidana, baik Kejahatan maupun Pelanggaran	2 Tahun Setelah Memiliki Kekuatan Hukum tetap	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
				1) Proses Verbal mulai dari Penyelidikan, Penyidikan sampai dengan Vonis								
				2) Berkas Pembelaan dan Bantuan Hukum								
				3) Telaah Hukum								
				4) Opini Hukum								
			b	Berkas Tentang Kasus/Sengketa Perdata	2 Tahun Setelah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan	Unit Pengolah Terkait
				1) Proses Verbal mulai dari Penyelidikan, Penyidikan sampai dengan Vonis								
				2) Pembelaan dan Bantuan Hukum								
				3) Telaah Hukum								

			a	Penyelenggaraan Acara Kedinasan (Upacara, Pelantikan, Peresmian, dan Jamuan termasuk Acara Peringatan Hari - hari Besar)	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			b	Buku Tamu Keprotokolan	2 Tahun	2 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				Buku Tamu Keprotokolan Pejabat Negara atau Tokoh Nasional								
			c	Agenda Kegiatan Pimpinan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			d	Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri Pejabat Negara atau Tokoh Nasional	1 Tahun	4 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2		Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3		Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		4		Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			a	Kliping Koran								
			b	Kliping Koran yang berkaitan dengan kasus/peristiwa lain								
			c	Brosur/Leaflet/Poster/Plakat								

			d	Pengumuman/Pemberitaan								
		5	Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintahan Daerah antara lain:									
			a	Hubungan Antar Lembaga Pemerintah	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			b	Hubungan Dengan Organisasi Sosial/LSM	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			c	Hubungan Dengan Perusahaan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			d	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			e	Forum Kehumasan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			f	Hubungan dengan Media Massa	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		6	Dengar Pendapat		1 Tahun	4 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak	Unit Pengolah Terkait

										Merugikan Siapapun	
		7	Bahan/Materi, Pidato Menteri Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		8	Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		9	Publikasi Melalui Media Cetak maupun Elektronik	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		10	Pameran/Sayembara/Lomba /Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		11	Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
	K	PENGAWASAN									
		1	Rencana Pengawasan								
			a Rencana Strategis Pengawasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya	Unit Pengolah Terkait

										Penegak Hukum	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			b	Rencana Kerja Pengawas Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			c	Rencana Kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			d	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2	Pelaksanaan Pengawasan									

			a	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) Yang Memerlukan Tindak Lanjut (TL)	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Memerlukan Tindak Lanjut	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			c	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tidak Memerlukan Tindak Lanjut	1 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			d	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

			e	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Yang Ada Tindak Lanjut	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			f	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	1 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			g	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			h	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

		i	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Reviu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		j	Good Corporate Governance (GCG)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	L	KEPEGAWAIAN									
		1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara								
		a	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), antara lain: Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		b	Perencanaan Pertimbangan Formasi antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan	Unit Pengolah Terkait

				Penetapan Formasi Ikatan Dinas						Penegak Hukum	Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			c	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			d	Standarisasi Jabatan antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		2	Formasi dan Pengadaan Pegawai									
			a	Formasi ASN antara lain: Usulan Formasi, Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan	Unit Pengolah Terkait

										Penegak Hukum	Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			c	Pengumuman Kelulusan ASN	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			d	Berkas Lamaran yang tidak diterima	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pengangkatan ASN	1 Tahun Setelah Berhenti atau Pensiun	9 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			f	<i>Open Bidding</i> (Seleksi Terbuka Jabatan)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			g	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak	Unit Pengolah Terkait

										Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			h	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		3	Mutasi Pegawai									
			a	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	1 Tahun Setelah Berhenti atau Pensiun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

			c	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	1 Tahun Setelah Berhenti atau Pensiun	9 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			d	Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	1 Tahun Setelah Berhenti atau Pensiun	9 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Peninjauan Masa Kerja	1 Tahun Setelah Diperbarui	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			f	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

			g	Nota dan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		4	Pengembangan Karir									
			a	Usulan Tugas Belajar/Ijin Belajar/Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran antar ASN dengan Pegawai Swasta	1 Tahun Setelah Izin Belajar Selesai	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Penyesuaian Ijazah	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			c	Penyusunan Sistem Karier	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

			d	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Angka Kredit antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		5	Kinerja Aparatur Sipil Negara									
			a	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pengelolaan <i>Database</i> dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

			c	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		6		Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN								
			a	Kode Etik Pegawai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Disiplin	2 Tahun Setelah Berkekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			c	Pemberhentian dengan Hormat	1 Tahun Setelah Berhenti atau Pensiun	9 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			d	Pemberhentian dengan Tidak Hormat	1 Tahun Setelah	9 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak	Unit Pengolah Terkait

				Berhenti atau Pensiun					Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
		e	Pemberhentian Sementara	1 Tahun Setelah Berhenti atau Pensiun	9 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		f	Pensiun ASN antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya	1 Tahun Setelah SK Ditetapkan	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		g	SK Pensiun ASN antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya	1 Tahun Setelah Berhenti atau Pensiun	9 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	7		Bantuan Hukum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak	Unit Pengolah Terkait

										Merugikan Siapapun		
		8	Status dan Kedudukan Pegawai	1 Tahun Setelah Berhenti atau Pensiun	9 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait	
		a	Status Kepegawaian									
		b	Kedudukan Kepegawaian									
		c	Keberatan Pegawai									
			d	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian								
		9	Sistem Informasi Kepegawaian									
			a	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	1 Tahun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Tahun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			c	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik	2 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan	Unit Pengolah Terkait

										Penegak Hukum	Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			d	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		10	Pengawasan dan Pengendalian									
			a	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			c	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya	Unit Pengolah Terkait

										Penegak Hukum	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			d	Kode Etik dan Disiplin	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Laporan Pengawasan Pengendalian Hasil dan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			f	Sanggahan Terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		11	Administrasi Pegawai		1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan	Unit Pengolah Terkait
		a	Cuti Sakit									
		b	Cuti Bersalin									
		c	Cuti Tahunan									
		d	Cuti Alasan Penting									
		e	Cuti Besar									

										Hukum	Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			f	Cuti di luar Tanggungan Negara	1 Tahun Setelah Berhenti atau Pensiun	9 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			g	Karpeg (Kartu Pegawai Negeri Sipil)/KPE (Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik)/Karis (Kartu Istri)/Karsu (Kartu Suami)	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			h	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			i	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan	Unit Pengolah Terkait

										Fungsi Lembaga Pemerintahan		
			j	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			k	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/Tunjangan	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		12	Kesejahteraan Pegawai									
			a	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			b	Asuransi Pegawai/BPJS	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			c	Tabungan Perumahan	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			d	Bantuan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak	Unit Pengolah Terkait

											Merugikan Siapapun	
			e	Pakaian Dinas	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Penggunaan internal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			f	Layanan Pegawai yang Meninggal karena Dinas	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			g	Pemberian Tali Kasih	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			h	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			i	Olahraga dan Rekreasi	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			j	Rekam Medis	2 Tahun Setelah Kunjungan Terakhir	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		13	Administrasi Perseorangan		1 Tahun Setelah	9 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan	Apabila Diketahui Oleh	
		a	Pegawai Negeri Sipil (PNS)									

			b	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Berhenti atau Pensiun					Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait	
			c	Pejabat Negara dan Pejabat lainnya yang disetarakan									
			d	Sekretaris Daerah									
			e	ASN Berjasa/Terlibat dalam Peristiwa Berskala Nasional									
		14	Penilaian Kompetensi		1 Tahun Setelah Berhenti atau Pensiun	9 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait	
		a	Penilaian Kompetensi										
			b	Hasil Penilaian Kompetensi									
	M	KEUANGAN											
		1	Rencana Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan RUU APBN-P										
			a	Penyusunan RAPBN	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait	
			1)	Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas, meliputi:									
			2)	Dokumen Rencana Strategis atas Rencana Kerja Jangka Panjang atau Rencana Kerja Lima Tahun									
			3)	Dokumen Rencana Kerja Tahunan									
			4)	Dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah	2 Tahun	5 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Unit Pengolah Terkait	Unit Pengolah Terkait	

				(RAKIP) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lemba ga (RKA-K/L)								
			5)	Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP)/Standar Biaya Khusus (SBK)	2 Tahun	5 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Unit Pengolah Terkait	Unit Pengolah Terkait
			b	Penyampaian RAPBN Pemerintah kepada DPR-RI	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			1)	Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN, meliputi:								
				a) Pidato Presiden Pengantar Nota Keuangan								
				b) Nota Keuangan								
				c) RUU APBN								
			2)	Pembahasan RAPBN oleh DPR-RI	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Unit Pengolah Terkait	Unit Pengolah Terkait
			3)	Nota Jawaban DPR-RI terkait dengan Pembahasan RUU APBN dengan DPR RI	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Unit Pengolah Terkait	Unit Pengolah Terkait
			c	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			d	Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional	2 Tahun Setelah Tindak	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak	Unit Pengolah Terkait

				1)	Surat Setoran Pajak (SSP)	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Unit Pengolah Terkait	Unit Pengolah Terkait
				2)	Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Unit Pengolah Terkait	Unit Pengolah Terkait
				3)	Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengambilan Belanja	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Unit Pengolah Terkait	Unit Pengolah Terkait
				4)	Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	5 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Unit Pengolah Terkait	Unit Pengolah Terkait
				5)	Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari Masing-Masing Satuan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Unit Pengolah Terkait	Unit Pengolah Terkait
				6)	Berkas Kelebihan Pembayaran Gaji atau Tunjangan Kinerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Unit Pengolah Terkait	Unit Pengolah Terkait

											Penegak Hukum		
				5)	Jasa	2 Tahun Setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN Disahkan Dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	5 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Unit Pengolah Terkait	Unit Pengolah Terkait
				6)	<i>Software</i> Komputer Catatan: yang Termasuk Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa antara lain: Pengumuman Lelang, Dokumen Prakuifikasi, Dokumen Peninjauan Lapangan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Berita Acara Pelelangan, Usulan Calon Pemenang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak/Adendum Kontrak	2 Tahun Setelah <i>Software</i> Tidak Digunakan	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Unit Pengolah Terkait	Unit Pengolah Terkait
				7)	Dokumen Pembayaran Keuangan: Pengajuan Kebutuhan Penarikan Kas, Bukti-Bukti Tagihan dari Pihak Ketiga dan yang Terkait, Surat Permintaan	2 Tahun Setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN Disahkan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	5 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Unit Pengolah Terkait	Unit Pengolah Terkait

					Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)								
				8)	Dokumen Tata Usaha Anggaran, yaitu: Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BKP), Buku Kas Pengawasan Anggaran, Rekening Koran Bank, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)	2 Tahun Setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN Disahkan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	5 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Unit Pengolah Terkait	Unit Pengolah Terkait
				9)	Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium	2 Tahun Setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN Disahkan	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Unit Pengolah Terkait	Unit Pengolah Terkait
				10)	Kartu Gaji	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Unit Pengolah Terkait	Unit Pengolah Terkait
				11)	Dokumen Akuntansi Keuangan, yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Kas Kas/Register Penutupan Kas, Arsip Data Komputer	2 Tahun Setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN Disahkan dan Tindaklanjut	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Unit Pengolah Terkait	Unit Pengolah Terkait

				(ADK), Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan KPPN	Hasil Pemeriksaan Selesai						Penegak Hukum		
			1 2)	Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Realisasi Pendapatan Negara, Laporan Barang Milik Negara (BMN), Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	2 Tahun Setelah UU tentang Pertanggung jawaban APBN Disahkan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	5 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup		Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Unit Pengolah Terkait	Unit Pengolah Terkait
		3	Bantuan/Pinjaman Luar Negeri										
			a	Daftar Proyek- proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	2 Tahun Setelah UU tentang Pertanggung jawaban APBN Disahkan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka		Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			b	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green Book</i>)	2 Tahun Setelah UU tentang Pertanggung jawaban APBN Disahkan dan Tindaklanjut Hasil	3 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka		Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait

					Pemeriksaan Selesai							
			c	Dokumen <i>Loan Agreement</i> Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), <i>Legal Opinion</i> , Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat-menyurat dengan <i>Lender</i>	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	5 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			d	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	5 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			e	Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berikut Lampirannya	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	5 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			1)	Reimbursement								
			2)	<i>Direct Payment/Transfer Procedure</i>								
			3)	<i>Special Commitment L/C Opening</i>								
			4)	<i>Spesial Acoount/Imprest Fund</i>								
			5)	Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri								
			6)	<i>Notice Of Disbursement</i>								
			g	Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	5 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait

			h	Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung Lainnya	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	5 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			i	Replenishment (Permintaan Penarikan Dari Negara Donor) meliputi antara lain: <i>No Objection Letter (NOL)</i> , <i>Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)</i> , <i>Statement of Expenditure (SE)</i>	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	5 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			j	<i>Staff Appraisal Report</i>	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	5 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			k	Report/Laporan yang terdiri dari:	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	5 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			1)	<i>Progress Report</i>								
			2)	<i>Monthly Report</i>								
			3)	<i>Quarterly Report</i>								
			4)	<i>Final Report/Completion Report</i>								
		4		Pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)								
			a	Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan	2 Tahun Setelah UU tentang Pertanggung jawaban APBN	5 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1) Kuasa Pengguna Anggaran								

			2)	Kuasa Pengguna Barang/Jasa	Disahkan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Selesai							
			3)	Pejabat Pembuat Komitmen								
			4)	Pejabat Pembuat Daftar Gaji								
			5)	Pejabat Penandatangan SPM								
			6)	Bendahara Penerimaan/Pengeluaran								
			7)	Pengelola Barang								
			8)	Unit Akutansi Pengguna Barang (UAPB)								
			9)	Unit akutansi Pengguna Anggaran (UAPA)								
			10)	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa								
			11)	Panitia Penerimaan Barang dan Jasa termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan								
		5	Sistem Akutansi Instansi (SAI)									
		a	Manual Implementasi Sistem Akutansi Instansi (SIA)		3 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		b	Kebijakan Instansi		1 Tahun Setelah Peraturan Diperbaharui	2 Tahun	Permanen	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		c	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi		2 Tahun Setelah UU Pertanggung	5 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak	Unit Pengolah Terkait

					jawaban APBN Disahkan						Merugikan Siapapun	
			d	Laporan Realisasi Sementara APBN	2 Tahun Setelah UU Pertanggung jawaban APBN Disahkan	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			e	Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara, yaitu:	5 Tahun Setelah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan n/ Tuntutan Ganti Rugi Dilunasi	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			1) Tuntutan Perbendaharaan									
			2) Tuntutan Ganti Rugi									
II	FUNGSI SUBSTANTIF											
	A	POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM										
		1	Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan	Unit Pengolah Terkait
			1) Koordinasi Penerapan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila									

				2)	Karakter dan Wawasan Kebangsaan							Fungsi Lembaga Pemerintahan	
				3)	Bela Negara								
				4)	Sejarah Kebangsaan dan Kewarganegaraan								
				5)	Pembauran dan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika								
			c	Pembinaan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1)	Pembinaan Umum								
				2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantuan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantuan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

		2	Politik Dalam Negeri									
		a	Perumusan Kebijakan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		b	Pelaksanaan Kebijakan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			1)	Koordinasi Kepemiluan								
			2)	Indeks Demokrasi Indonesia								
			3)	Sosialisasi dan Implementasi Kebijakan Politik								
			4)	Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Legislatif								
			5)	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik								
			6)	Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik								
			7)	Pendidikan Politik								
			8)	Pengembangan Etika dan Budaya Politik								
			9)	Informasi dan Komunikasi Politik								
			10)	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi dan Demokrasi								

			1 1)	Pemantauan Perkembangan Politik Dalam Negeri								
			c	Pembinaan:	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1) Pembinaan Umum								
				2) Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/ Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			f	Koordinasi Stabilitas Politik Daerah serta Kawasan Objek Vital dan Strategis Nasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		3		Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								

			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1)		Koordinasi Ketahanan Ekonomi								
		2)		Penanganan Konflik Sosial								
		3)		Kerja Sama Intelijen Ekonomi								
		4)		Fasilitasi Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi								
		5)		Ketahanan Sosial Kemasyarakatan								
		6)		Ketahanan Seni dan Budaya								
		7)	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan									
			c	Pembinaan:	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1)	Pembinaan Umum									
		2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi									
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya	Unit Pengolah Terkait

										Penegak Hukum	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			f	Koordinasi Stabilitas Sosial Daerah, Kerjasama Intelijen Ekonomi, serta Kawasan Objek Vital dan Strategis Nasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		4	Organisasi Kemasyarakatan									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan	Unit Pengolah Terkait
			1)	Koordinasi Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi								

				Kemasyarakatan						Serta Penegak Hukum	Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
				2) Pemberdayaan dan Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan								
				3) Pengawasan dan Evaluasi								
				4) Mediasi Sengketa dan Konflik Organisasi Kemasyarakatan								
				5) Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Asing dan Lembaga Asing								
			c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1) Pembinaan Umum								
				2) Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan	Unit Pengolah Terkait

											Fungsi Lembaga Pemerintahan	
		5	Kewaspadaan Nasional									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			1)	Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Keamanan								
			2)	Kewaspadaan Informasi dan Media								
			3)	Fasilitasi Hubungan Antar-Lembaga Pemerintah								
			4)	Pengawasan Orang Asing								
				5)	Penanganan Konflik Pemerintahan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							
			c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			1)	Pembinaan Umum								
				2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi							
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat	Unit Pengolah Terkait

										Eksternal Serta Penegak Hukum	Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	B	BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN										
		1	Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
				1) Koordinasi dan Pembinaan Umum Pelaksanaan Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat								
				2) Fasilitasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan								

				3)	Fasilitasi Pembinaan Kerja Sama Daerah								
				4)	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Antar-Daerah								
				5)	Fasilitasi Pelayanan Umum								
				6)	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan								
			c	Pembinaan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1)	Pembinaan Umum								
				2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan	Unit Pengolah Terkait

										Fungsi Lembaga Pemerintahan		
		2	Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			1)	Koordinasi dan Pembinaan Umum Pelaksanaan Penyelenggaraan Kawasan Khusus								
			2)	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan								
			3)	Pengelolaan Perkotaan								
			4)	Perbatasan Negara dan Pulau-pulau Terluar								
			c	Pembinaan:	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			1)	Pembinaan Umum								
			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan	Unit Pengolah Terkait

										Penegak Hukum	Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		3	Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1) Koordinasi dan Pembinaan Umum serta Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
				2) Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja								

				3) Prasarana dan Sarana Polisi Pamong Praja								
				4) Standardisasi Satuan Polisi Pamong Praja								
				5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil								
				6) Pelindungan Hak-hak Sipil								
				7) Hak Asasi Manusia								
			c	Pembinaan:	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1) Pembinaan Umum								
				2) Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		4	Toponimi dan Batas Daerah									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak	Unit Pengolah Terkait

										Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1) Koordinasi dan Pembinaan Umum Pembakuan Rupa Bumi dan Data Wilayah								
				2) Penetapan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau								
				3) Batas Kecamatan dan Kelurahan								
				4) Penetapan Perbatasan Antar-Daerah								
				5) Penetapan Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi								
			c	Pembinaan:	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1) Pembinaan Umum								
				2) Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya	Unit Pengolah Terkait

										Penegak Hukum	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		5	Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1)		Koordinasi dan Pembinaan Umum serta Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana								
		2)		Prasarana dan Sarana								
		3)		Tanggap Darurat Pascabencana								
				4)								
				Standardisasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan								

				5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan								
			c	Koordinasi Penyusunan Pemetaan dibidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			d	Pembinaan: 1) Pembinaan Umum 2) Bimbingan Teknis dan Supervisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			f	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya	Unit Pengolah Terkait

										Penegak Hukum	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
	C	OTONOMI DAERAH										
		1	Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah									
		a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait	
		b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait	
			1) Koordinasi di Bidang Penataan Daerah									
			2) Pembinaan Daerah Persiapan									
			3) Fasilitasi Otonomi Khusus									
			4) Daerah Istimewa									
		c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait	
			1) Pembinaan Umum									
			2) Bimbingan Teknis dan Supervisi									
		d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan	Unit Pengolah Terkait	

										Serta Penegak Hukum	Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			f	Fasilitasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2		Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah								
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1)		Pembinaan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah								

			c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1) Pembinaan Umum								
				2) Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		3		Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah								
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun		Musnah	Biasa	Terbuka			

				1) Koordinasi Pembinaan Umum Penataan Kelembagaan Daerah		3 Tahun				Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				2) Koordinasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah								
			c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1) Pembinaan Umum								
				2) Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		4		Produk Hukum Daerah								
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya	Unit Pengolah Terkait

										Penegak Hukum	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			b	Pelaksanaan dan Penyerasian Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1) Koordinasi dan Klasifikasi serta Dokumentasi di Bidang Pembinaan Penyusunan Produk Hukum								
				2) Fasilitasi, Pengkajian, dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan								
			c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1) Pembinaan Umum								
				2) Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan	Unit Pengolah Terkait

										Fungsi Lembaga Pemerintahan	
		5	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah								
		a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		b	Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
	1)		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								
	2)		Peningkatan Kapasitas Daerah								
		c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
	1)		Pembinaan Umum								
	2)		Bimbingan Teknis dan Supervisi								
		d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak	Unit Pengolah Terkait

										Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			f	Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
	D	Bina Pembangunan Daerah										
		1	Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1)		Perencanaan								
		2)		Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
			c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak	Unit Pengolah Terkait
		1)		Pembinaan Umum								

			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi							Merugikan Siapapun	
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			f	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			g	Fasilitasi Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan serta Pengevaluasian Pembangunan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2		Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I								
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya	Unit Pengolah Terkait

			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1)		Pekerjaan Umum								
		2)		Perumahan dan Kawasan Pemukiman								
		3)		Kelautan dan Perikanan								
			4)	Perhubungan								
			c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1)		Pembinaan Umum								
			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan	Unit Pengolah Terkait

											Fungsi Lembaga Pemerintahan	
		4	Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III									
		a	Perumusan Kebijakan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		b	Pelaksanaan Kebijakan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1)	Sosial dan Budaya									
		c	Pembinaan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1)	Pembinaan Umum									
		2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi									
		d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya	Unit Pengolah Terkait

										Penegak Hukum	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
		5	Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1)		Ketenagakerjaan dan Transmigrasi								
			2)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
			c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1)		Pembinaan Umum								
		2)		Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak	Unit Pengolah Terkait

										Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
	E	BINA PEMERINTAHAN DESA										
		1	Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa									
		a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait	
		b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait	
		1)	Fasilitasi Penataan Wilayah Desa									
		2)	Fasilitasi Penataan Kewenangan dan Produk Hukum Desa									
		3)	Administrasi Pemerintahan Desa									
		c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait	
		1)	Pembinaan Umum									
		2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi									
		d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat	Unit Pengolah Terkait	

										Eksternal Serta Penegak Hukum	Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		2	Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1)		Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa								
		2)		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa								
		3)		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa								
			c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak	Unit Pengolah Terkait
		1)		Pembinaan Umum								

			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi							Merugikan Siapapun	
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		3	Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak	Unit Pengolah Terkait
				1) Fasilitasi Kerja Sama Desa								

			2)	Lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa							Merugikan Siapapun	
			c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1) Pembinaan Umum								
				2) Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		4		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu								
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya	Unit Pengolah Terkait

										Penegak Hukum	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1)		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa								
		2)		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga								
		3)		Pos Pelayanan Terpadu								
			c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1)		Pembinaan Umum								
		2)		Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

		5	Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa										
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait	
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait	
				1)									Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa
				2)									Fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi Desa
				3)									Evaluasi Perkembangan Desa
			c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait	
				1)									Pembinaan Umum
				2)									Bimbingan Teknis dan Supervisi
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait	
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak	Unit Pengolah Terkait	

									Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan		
	F	BINA KEUANGAN DAERAH										
		1	Perencanaan Anggaran Daerah									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
				1) Perencanaan Anggaran Daerah								
			c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1) Pembinaan Umum								
				2) Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat	Unit Pengolah Terkait

									Eksternal Serta Penegak Hukum	Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan		
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			f	Pengesahan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			g	Pengelolaan Hibah Daerah	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			h	Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan	Unit Pengolah Terkait

										Serta Penegak Hukum	Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			i	Sistem Informasi Keuangan Daerah	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		2	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		1)		Pelaksanaan								
		2)		Penatausahaan								
		3)		Akuntansi								
		4)		Pelaporan								
			5)	Pertanggungjawaban Keuangan Daerah								
			c	Pembinaan	2 Tahun		Musnah	Biasa	Terbuka			

				1) Pembinaan Umum		3 Tahun				Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				2) Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			f	Perumusan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			g	Perumusan Pelaksanaan Pengesahan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya	Unit Pengolah Terkait

				Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi						Penegak Hukum	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			h	Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengolahan Data Pelaksanaan Anggaran Daerah	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		3	Pendapatan Daerah									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan Pendapatan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak	Unit Pengolah Terkait
				1) Pembinaan Umum								

			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi							Merugikan Siapapun	
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			f	Pengolahan Data dan Informasi	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		4		Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah								
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan	Unit Pengolah Terkait

										Penegak Hukum	Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
				1) Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum								
				2) Pembiayaan Daerah								
			c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1) Pembinaan Umum								
				2) Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

			f	Pengelolaan Data Teknis dan Informasi Bidang Polhukam	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Rahasia	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Pihak Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Penyelenggaraan Negara, Sumber Daya Nasional dan/atau Ketertiban Umum	Unit Pengolah Terkait
			g	Layanan Manajemen Pusat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		5		Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah								
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak	Unit Pengolah Terkait
				1) Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan dan								

				Aneka Usaha serta investasi daerah							Merugikan Siapapun	
			2)	Badan Layanan Umum Daerah								
			3)	Barang Milik Daerah Wilayah I								
			c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			1)	Pembinaan Umum								
			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	G	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
		1	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan	Unit Pengolah Terkait

										Serta Penegak Hukum	Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
				1) Identitas Penduduk dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan								
				2) Pindah Datang Penduduk dan Penduduk Nonpermanen								
				3) Pencatatan Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak								
				4) Perubahan Status Kewarganegaraan serta Monitoring, Evaluasi, Dokumentasi								
				5) Database Kependudukan								
				a) Pengelolaan Dokumen Kependudukan								
				b) Manajemen Informasi								
				1) Pengelolaan Dokumen Kependudukan								
				2) Manajemen Informasi								
			c	Pembinaan:	2 Tahun		Musnah	Biasa	Terbuka			

				1) Pembinaan Umum		3 Tahun				Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				2) Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Fasilitasi Penyusunan Pemetaan Urusan Pemerintahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			f	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			g	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan	Unit Pengolah Terkait

										Fungsi Lembaga Pemerintahan		
		2	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			1)	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan								
			2)	Pengelolaan dan Pelayanan Data Kependudukan								
			3)	Pengelolaan <i>Data Center</i> dan <i>Disaster Recovery Center</i>								
			4)	Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi, Monitoring, Evaluasi, dan Dokumentasi								
			5)	Manajemen Informasi								
			c	Pembinaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			1)	Pembinaan Umum								
			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi								

			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		3	Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan	Unit Pengolah Terkait
				1) Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Daerah								

				2) Fasilitasi Penyusunan Program Kegiatan							Fungsi Lembaga Pemerintahan	
				3) Fasilitasi Pelaporan Pengelolaan Keuangan								
				4) Penguatan dan Penataan Kelembagaan								
				5) Pengelolaan Jabatan Fungsional								
				6) Pengelolaan Pengangkatan, Pemberhentian, Penilaian Kinerja Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
				7) Pengelolaan Aset Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah, dan Penegakan Hukum								
				8) Manajemen Informasi								
			c	Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Administrator <i>Database</i> Kependudukan dan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			d	Pelaksanaan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Direktorat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			e	Pembinaan:	2 Tahun		Musnah	Biasa	Terbuka			

				1) Pembinaan Umum		3 Tahun				Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				2) Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			f	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			g	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		4	Integrasi Data Kependudukan Nasional									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah	Rahasia	Tertutup	Penentu Kebijakan	Apabila Diketahui Oleh Pihak Yang	

				1) Integrasi Data Kependudukan Nasional Bagi Pengguna Pusat untuk Pemanfaatan Data Kependudukan, Layanan Teknis, Hak Akses Data, Data Balik, Sinkronisasi dan Integrasi Data Kependudukan, Keamanan Informasi, Pengendalian Teknis Pengamanan Sistem, Monitoring, Evaluasi, dan Dokumentasi	Diperbarui					Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Penyelenggaraan Negara, Sumber Daya Nasional dan/atau Ketertiban Umum	Unit Pengolah Terkait
			c	Pembinaan:	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1) Pembinaan Umum								
				2) Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya	Unit Pengolah Terkait

										Penegak Hukum	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			f	Manajemen informasi di Bidang Integrasi Data Kependudukan Nasional bagi Pengguna Pusat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		5	Integrasi Data Kependudukan Daerah									
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Rahasia	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Pihak Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Penyelenggaraan Negara, Sumber Daya Nasional dan/atau Ketertiban Umum	Unit Pengolah Terkait
		1)		Integrasi Data Kependudukan Nasional Bagi Pengguna Daerah Untuk Pemanfaatan Data Kependudukan, Layanan Teknis, Hak Akses Data, Data Balikan, Sinkronisasi dan Integrasi Data								

				Kependudukan, Keamanan Informasi, Pengendalian Teknis Pengamanan Sistem, Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi								
			c	Pembinaan:	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1) Pembinaan Umum								
				2) Bimbingan Teknis dan Supervisi								
			d	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			f	Manajemen Informasi di Bidang Integrasi Data Kependudukan Nasional bagi Pengguna Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan	Unit Pengolah Terkait

										Fungsi Lembaga Pemerintahan	
	H	STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI									
		1	Strategi Kebijakan Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri								
		a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		b	Pelaksanaan Kebijakan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Strategi Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			1) Politik								
			2) Hukum								
			3) Hak Asasi Manusia								
			4) Pemerintahan Umum								
			5) Pemerintahan Daerah dan Desa								
		c	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemanfaatan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah dan Desa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		d	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Analisis dan Pemberian Rekomendasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak	Unit Pengolah Terkait

				Strategi Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah dan Desa							Merugikan Siapapun	
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			f	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		2		Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik								
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Analisis dan Pemberian Rekomendasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka		Apabila Diketahui Oleh	

				1) Administrasi Kewilayahan Daerah dan Desa						Pengguna Internal dan Eksternal	Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				2) Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
				3) Layanan Publik								
			c	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemanfaatan Hasil Analisis Strategi Kebijakan dibidang Administrasi Kewilayahan Daerah dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pelayanan Publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			d	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Stategi Kebijakan dibidang Administrasi Kewilayahan Daerah dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pelayanan Publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			f	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya	Unit Pengolah Terkait

										Penegak Hukum	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
		3	Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa									
			a Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait	
			b Pelaksanaan Analisis dan Pemberian Rekomendasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait	
			1) Pembangunan									
			2) Keuangan Daerah dan Desa									
			c Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemanfaatan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait	
			d Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Strategi Kebijakan dibidang Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait	

			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			f	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		4		Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri								
			a	Perumusan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			b	Pelaksanaan Analisis dan Pemberian Rekomendasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1)		Pengembangan Sumber Daya Manusia								

				2) Pembinaan Kelembagaan								
				3) Ketatalaksanaan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri								
				4) Pengembangan Potensi dan Penerapan Teknologi Informasi								
				5) Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri								
				6) Inovasi Pemerintahan Daerah dan Inovasi Desa								
			c	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemanfaatan Hasil Analisis Strategi Kebijakan dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembinaan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, Pengembangan Potensi dan Penerapan Teknologi Informasi, Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, Inovasi Pemerintahan Daerah dan Desa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			d	Fasilitasi Pendampingan dan Pelaksanaan Pembinaan Strategi Kebijakan dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembinaan Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait

				Ketatalaksanaan, Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, Pengembangan Potensi dan Penerapan Teknologi Informasi, Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, Inovasi Pemerintahan Daerah dan Desa								
			e	Pelaksanaan Sosialisasi, Desiminasi, Asistensi, Bimbingan Teknis dan Hubungan Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			f	Pengelolaan Data Teknis Dan Sistem Informasi	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			g	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			h	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan	Unit Pengolah Terkait

				Pemerintahan Dalam Negeri								
			d	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			e	Pengelolaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1)		Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri dan Asesor Kompetensi								
		2)		Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri								
			f	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			g	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		2		Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri								

			a	Penyusunan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
				1) Teknis								
				2) Rencana Pengembangan Kompetensi Pemerintah Dalam Negeri								
			b	Pelaksanaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1) Pengembangan Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri								
				2) Orientasi dan Pendalaman Tugas								
				3) Pengembangan Kompetensi Tenaga Penyelenggara dan Tenaga Pengajar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri								
				4) Uji Coba Pengembangan Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri								
			c	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			d	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan	Unit Pengolah Terkait

										Serta Penegak Hukum	Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
			e	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		3	Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan									
			a	penyusunan kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			1)	Teknis								
			2)	Rencana Pengembangan Kompetensi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, Kepemimpinan, dan Manajemen Kesekretariatan								
			b	Pelaksanaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			1)	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil								
			2)	Pelatihan Kepemimpinan								
				3)								
				Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri								

				4) Pengembangan Kompetensi Kader Pemerintahan Dalam Negeri								
				5) Pengembangan Kompetensi Manajemen Kesekretariatan								
				6) Pengembangan Kompetensi Tenaga Penyelenggara dan Tenaga Pengajar Bidang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, Kepemimpinan, dan Manajemen Kesekretariatan								
				7) Uji Coba Pengembangan Kompetensi								
			c	Pembinaan, Pengorganisasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			d	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak	Unit Pengolah Terkait

										Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	
		4	Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis									
			a	penyusunan kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
				1) Teknis								
				2) Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif dan Fungsional Binaan Kementerian								
				3) Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif dan Fungsional Binaan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Nonkementerian								
			b	Pelaksanaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
				1) Pengembangan Kompetensi Bidang Kompetensi Teknis Substantif dan Fungsional								
				2) Pengembangan Kompetensi Tenaga Penyelenggara, dan Tenaga Pengajar								
				3) Uji Coba Pengembangan Kompetensi Bidang								

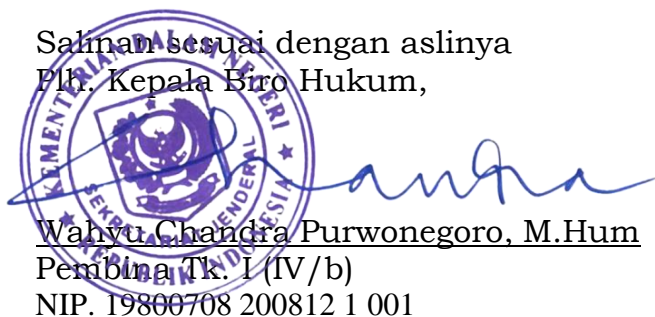
				Kompetensi Teknis Substantif dan Fungsional								
			c	Pembinaan, Pengorganisasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa	Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Apabila Diketahui Oleh Publik Tidak Merugikan Siapapun	Unit Pengolah Terkait
			d	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			e	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Tertutup	Penentu Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila Diketahui Oleh Yang Tidak Berhak Dapat Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001